

Peran Dinas Perdagangan Perindustrian dan Koperasi UMKM Pemerintah Kota Serang dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kota Serang

Siti Asyiah¹ Ria Yuni Lestari¹ Ronni Juwandi³

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Kota Serang, Provinsi Banten, Indonesia^{1,2,3}

Email: asiyahwidodo98@gmail.com¹

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pemberdayaan UMKM di kota serang yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan Perindustrian dan Koperasi UMKM Pemerintah Kota Serang. Untuk mengetahui tantangan yang dihadapi oleh Dinas Perdagangan Perindustrian dan Koperasi UMKM Pemerintah Kota Serang dalam Pemberdayaan UMKM di Kota Serang. Untuk mengetahui inovasi yang dilakukan Dinas Perdagangan Perindustrian Dan Koperasi UMKM Pemerintah Kota Serang dalam melakukan Pemberdayaan UMKM di Kota Serang. Metode yang digunakan ialah metode pendekatan kualitatif. Adapun sumber informan dalam penelitian ini diantaranya kepala Dinas Perdagangan Perindustrian dan Koperasi UMKM Pemerintah Kota Serang, Kepala Bidang UMKM Pemerintah Kota Serang, dan pelaku UMKM (mikro) di Kota Serang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Dinas Perdagangan Perindustrian dan Koperasi UMKM Pemerintah Kota Serang Dalam Pemberdayaan UMKM di Kota Serang sudah cukup baik dalam pemberdayaan terhadap Usaha Kecil Menengah. Terdapat beberapa tantangan yang dihadapi oleh Dinas Perdagangan Perindustrian dan Koperasi UMKM Pemerintah Kota Serang dalam Pemberdayaan UMKM di Kota Serang adalah pertama, keterbatasan sumber daya manusia diantaranya adalah konsultan dan tenaga penyuluh. Kedua, terbatasnya anggaran yang dimiliki. Ketiga, kesulitan permodalan UMKM. Keempat, Permasalahan teknis UMKM. Permasalahan teknis yang dihadapi oleh UMKM adalah seputar proses produksi, teknik pemasaran, promosi produk. Inovasi yang dilakukan Dinas Perdagangan Perindustrian Dan Koperasi UMKM Pemerintah Kota Serang dalam melakukan Pemberdayaan UMKM di Kota Serang adalah pertama, adanya struktur yang terintegrasi. Kedua, adanya Koperasi yang menaungi UMKM. Ketiga, pemanfaatan teknologi ebusiness. Keempat, dukungan pihak-pihak terkait. Dinas Koperasi dan UMKM Kota Serang memiliki pegawai yang sebagian kurang berkompeten dalam bidang UMKM sehingga perlu mengembangkan jaringan kerjasama dengan Dinas terkait seperti Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Kata Kunci: Peran, UMKM, Pemberdayaan Masyarakat.

Abstract

This study aims to determine the empowerment of UMKM in the city of Serang carried out by the Department of Trade, Industry and Cooperatives of UMKM, Serang City Government. To find out the challenges faced by the Department of Trade, Industry and Cooperatives of UMKM in Serang City Government in Empowering UMKM in Serang City. To find out the innovations made by the Department of Trade, Industry and Cooperatives of UMKM, Serang City Government, in empowering UMKM in Serang City. The method used is a qualitative approach method. The sources of informants in this study include the head of the Department of Trade, Industry and Cooperatives of UMKM in Serang City Government, Head of the UMKM Division of Serang City Government, and UMKM (micro) actors in Serang City. The results showed that the role of the Department of Trade, Industry and UMKM Cooperatives of Serang City Government in Empowering UMKM in Serang City was quite good in empowering Small and Medium Enterprises. There are several challenges faced by the Office of Trade, Industry and Cooperatives of UMKM in Serang City Government in empowering UMKM in Serang City. First, the limitations of human resources include consultants and extension workers. Second, the limited budget they have. Third, the difficulty of UMKM capital. Fourth, UMKM technical problems. The technical problems faced by UMKM are around the production process, marketing techniques, product promotion. The innovations carried out by the Department of Trade, Industry and Cooperatives of UMKM in Serang City Government in empowering UMKM in Serang City are the first, the existence of an integrated structure. Second, there is a

cooperative that houses UMKM. Third, the use of e-business technology. Fourth, the support of related parties. The Office of Cooperatives and UMKM in Serang City has employees who are partially incompetent in the field of UMKM, so it is necessary to develop a network of cooperation with related agencies such as the Department of Industry and Trade.

Keywords: Role, UMKM, Community Empowerment.



This work is licensed under a [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Arus globalisasi yang semakin pesat merupakan tantangan bagi perkembangan ekonomi di Indonesia sebagai salah satu negara yang memiliki jumlah penduduk ke empat terbanyak di dunia dan didukung oleh bonus demografi produktif yang tinggi dan sumber daya alam yang sangat melimpah seharusnya Indonesia menjadi negara yang mandiri dalam bidang ekonomi. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistika (BPS) Kota Serang Tahun 2019, banyaknya pencari kerja di Kota Serang tahun 2019 sebanyak 6.142 juta orang, naik 53.916 orang dibanding bulan februari 2018. Meningkatnya jumlah angkatan kerja tidak disertai dengan naiknya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) yang justru mengalami penurunan sebesar 0,87 poin. Ini disebabkan oleh adanya pergeseran penduduk dari angkatan kerja ke bukan angkatan kerja. Dalam setahun terakhir pengangguran berkurang 6.947 orang, sejalan dengan tingkat pengangguran terbuka (TPT) yang turun menjadi 7,58% pada bulan februari 2019 dilihat dari tingkat pendidikan, TPT untuk sekolah menengah kejuruan (SMK) masih tertinggi diantara tingkat pendidikan lain, yaitu sebesar 11,65%.

Maka hal itu membuktikan bahwa permasalahan yang dihadapi di Kota Serang yaitu bagaimana mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan. Salah satunya dengan penguatan UMKM, Jasa, Perdagangan, dan Revitalisasi Pertanian sebagai salah satu prioritas atau tujuan dan sasaran pembangunan di Kota Serang khususnya Pencapaian atas terjalannya hubungan kerjasama kemitraan antara UMKM dengan lembaga keuangan, terciptanya kerjasama antara industri besar dengan industri kecil yang mendukung perekonomian daerah. Selain itu hubungan kerjasama kemitraan antara UMKM dengan lembaga keuangan yang dapat terwujud melalui pencapaian (*outcome*) atau dampak yang berupa terciptanya hubungan yang baik antara UMKM dengan lembaga keuangan. Pencapaian (*outcome*) ini dilakukan dengan pelaksanaan output berupa adanya kegiatan promosi produksi UMKM secara berkala dan pemberian penghargaan oleh lembaga keuangan kepada para UMKM berkinerja baik oleh dinas yang terkait.

UMKM sendiri adalah salah satu jenis usaha yang menyerap cukup banyak sumber daya lokal, akan tetapi yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa mengoptimalkan sumber daya lokal tidak hanya dari pelaku UMKM, tapi harus ada kerjasama dari pihak-pihak yang lain seperti pemerintah dan organisasi masyarakat untuk mengembangkan UMKM yang ada. Maka pemerintah dalam hal ini ikut adil dalam kemajuan UMKM di Kota Serang khususnya. Uraian diatas menggambarkan permasalahan ekonomi di Kota Serang yaitu bagaimana mengurangi tingkat pengangguran dan kemiskinan melalui konsep Pemberdayaan Masyarakat Di Kota Serang. Yaitu dengan penguatan UMKM, Jasa Perdagangan, dan Revitalisasi Pertanian sebagai salah satu prioritas atau tujuan dan sasaran pembangunan di Kota Serang.

Berdasarkan studi pendahuluan yang telah saya lakukan di Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi UMKM Pemerintah Kota Serang pada hari Senin, tanggal 13 Januari 2020 melalui wawancara kepada bapak H. Ahmad Jazuli, M.Pd selaku kepala bidang UMKM terdapat jumlah UMKM Kota Serang yaitu 10.527 anggota. Namun terdapat beberapa masalah di UMKM Kota Serang yaitu kurangnya ilmu pengetahuan masyarakat terkait kualitas

mutu produk yang dihasilkan, kurangnya modal usaha pada pelaku usaha, terbatasnya pengetahuan masyarakat dalam pemasaran produk usaha, kurangnya kemampuan dalam manajerial usaha sehingga tidak dapat meningkatkan usaha tersebut. Selain itu Salah satu masalah besar yang dihadapi dalam pemberdayaan UMKM adalah rendahnya akses UMKM terhadap pasar. Secara konseptual diketahui bahwa empat unsur yang mempengaruhi keberhasilan suatu perusahaan dalam berkompetisi adalah a) produk, b) harga, c) empat/lokasi dan, d) promosi. Keempat faktor strategis ini saling terkait dalam meningkatkan fungsi pemasaran. Dalam era keterbukaan ini dimana batas-batas ruang sudah mulai ditinggalkan peran faktor promosi yang terkait dengan ruang yang sangat luas mulai memperlihatkan pengaruh dominannya

Melihat permasalahan yang dihadapi oleh UMKM perlu adanya suatu upaya terutama dari pemerintah agar UMKM terus berkembang karena peranannya yang begitu besar dalam perekonomian nasional. Upaya yang dapat dilakukan pemerintah untuk membantu UMKM mengatasi masalah yaitu dengan diadakannya pemberdayaan UMKM oleh pemerintah. Dengan praktik pemberdayaan yang dapat dilakukan oleh pemerintah yaitu seperti pemberian bantuan modal, bantuan pendampingan atau pelatihan pemasaran bagi para pelaku UMKM. Meskipun memiliki peran yang besar, untuk memaksimalkan perannya, sektor UMKM memerlukan dukungan yang tepat dan terarah. Hal ini karena terdapat tantangan yang perlu dihadapi dalam meningkatkan daya saing sehingga pelaku usaha kecil mampu bertahan dan tak harus 'gulung tikar' karena tidak mampu menghadapi tantangan dalam berbisnis.

Berikut beberapa hal yang menjadi tantangan dan kerap dihadapi oleh para pelaku usaha mikro, kecil, dan juga menengah di masa kini. 1) Strategi bisnis. Menjalankan usaha merupakan suatu hal yang gampang-gampang-susah. Maka dari itu, pelaku usaha termasuk UMKM perlu menerapkan strategi bisnis yang tepat agar usaha yang dijalani bisa bertahan. Sayangnya, tidak sedikit pelaku usaha kecil yang belum memahami akan pentingnya strategi bisnis ini. Nah, untuk menghadapinya, bagi pelaku usaha kecil, diferensiasi produk dan memaksimalkan pemasaran menjadi strategi bisnis yang bisa diterapkan. 2) Pendampingan akses teknologi.

Di era serba digital seperti saat ini, pelaku UMKM memerlukan pendampingan akses teknologi. Namun, dari 64 juta UMKM di Indonesia, saat ini, menurut Deputi Bidang Kewirausahaan Kemenkop UKM Siti Azizah dalam webinar bertajuk Peran Perbankan dalam Ekosistem Digital UMKM Masa Depan, Kamis (23/9/2021) lalu, sebanyak 15,3 juta usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM telah masuk ke dalam ekosistem digital. 3) Akses pembiayaan. Dalam mengembangkan usaha, akses pembiayaan yang sulit merupakan sebuah tantangan besar yang harus dihadapi pelaku UMKM. Terlebih, biasanya, pelaku usaha kecil selalu dihadapkan dengan bunga yang tinggi saat ingin mendapatkan akses pembiayaan. Hal inilah akhirnya yang membuat UMKM sulit untuk berkembang dan bersaing dengan kompetitor.

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan hal tersebut yang berjudul "Peran Dinas Perdagangan Perindustrian dan Koperasi UMKM Pemerintah Kota Serang Dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kota Serang". Dengan demikian peneliti dapat merumuskan beberapa masalah berdasarkan identifikasi masalah diatas.

METODE PENELITIAN

Menurut Narbuko dan Achmadi (2010:1) mengatakan metodologi penelitian berasal dari kata "metode" yang artinya cara yang tepat untuk melakukan sesuatu dan "logos" yang artinya ilmu atau pengetahuan. Jadi metodologi artinya cara untuk melakukan sesuatu dengan

menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai tujuan. Menurut Sugiyono (2018:2) metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Menurut Sumkmadinata (2016: 60) penelitian kualitatif (*Qualitative Research*) adalah suatu penelitian yang ditunjuk untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktifitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok. Sedangkan menurut Arikunto (2013: 3) penelitian deskriptif merupakan penelitian yang benar-benar hanya memaparkan apa yang terjadi didalam sebuah kancah, lapangan, atau wilayah tertentu.

Metode penelitian ini yang berjudul peran Dinas Perdagangan Perindustrian dan Koperasi UMKM Pemerintah Kota Serang dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kota Serang, merupakan deskripsi suatu peristiwa atau kejadian. Alasan menggunakan jenis penelitian ini bertujuan untuk menangkap data secara mendalam mengenai suatu fenomena yang terjadi dilapangan. Penelitian kualitatif tidak bertujuan untuk mengkaji kebenaran suatu teori akan tetapi mengembangkan teori yang sudah ada. Selain itu digunakannya pendekatan kualitatif karenapeneliti ingin melihat secara langsung realita yang terjadi dilapangan.

Penelitian kualitatif digunakan dalam penelitian ini untuk mengamati seperti apa Peran Dinas Perdagangan Perindustrian dan Koperasi UMKM Pemerintah Kota Serang dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kota Serang, bagaimana tantangan yang dihadapi oleh Dinas Perdagangan Perindustrian dan Koperasi UMKM Pemerintah Kota Serang dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kota Serang, serta bagaimana inovasi yang dilakukan Dinas Perdagangan Perindustrian Dan Koperasi UMKM Pemerintah Kota Serang dalam melakukan Pemberdayaan Masyarakat di Kota Serang. Penelitian kualitatif merupakan penelitianyang berusaha memaparkan, mengkaji, dan mengkaitkan data yang diperoleh baik secara tekstual kedalam tulisan-tulisanuntuk mendapatkan kejelasan terhadap permasalahan yang dibahas.

Adapun kategori pelaku UMKM yang akan peneliti wawancarai di Kota Serang yaitu kategori usaha mikro yang memiliki kriteria dengan pendapatan atau omset kurang lebih 300 juta pertahun dan memiliki aset 50 juta. Kategori usaha mikro ini yang sering mendapatkan pembinaan dari Disperdaginkop dan untuk kategori usaha kecil dan menengah jarang mendapatkan pembinaan dibandingkan kategori usaha mikro. Penelitian ini menggunakan pedoman wawancara semi terstruktur. Artinya peneliti terlebih dahulu mengajukan pertanyaan yang sudah disusun, kemudian satu persatu diperdalam dengan pertanyaan yang tidak terstruktur. Tujuan dilakukannya wawancara ini yaitu untuk mengetahui Peran Dinas Perdagangan Perindustrian dan Koperasi UMKM Pemerintah Kota Serang dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kota Serang. Adapun narasumber yang akan peneliti wawancara yaitu kepala Dinas Perdagangan Perindustrian dan Koperasi UMKM Pemerintah Kota Serang, Kepala Bidang UMKM Pemerintah Kota Serang, dan pelaku UMKM (mikro) di Kota Serang.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

UMKM berbasis ekonomi kreatif memerlukan kerja sama dari berbagai pihak untuk mencapai kemajuan di dunia usaha. Tidak hanya pemerintah dan pelaku UMKM itu sendiri, tetapi juga masyarakat perlu turut serta mengembangkannya. Upaya tersebut dapat tercermin melalui penggunaan produk lokal dan kampanye untuk senantiasa menggunakan produk buatan anak bangsa. Selain itu, kerjasama antar individu juga diperlukan untuk menghindari terciptanya iklim persaingan yang tidak sehat. Pihak pemerintah mengatakan untuk melakukan pengembangan UMKM kreatif di Kota Serang harus dilakukan antisipasi ke depan yang sifatnya kontinyu.

Seperti penuturan Staff Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Serang berikut: UMKM berbasis ekonomi kreatif harus senantiasa menjaga mutu serta meningkatkan kreatifitas dan inovasinya dalam menghasilkan karya-karya baru. Peningkatan kreatifitas bagi para pelaku UMKM dapat dilakukan melalui serangkaian proses pelatihan dari pemerintah seperti manajemen pengelolaan usaha, manajemen pemasaran, keuangan, dan lain sebagainya. Hal tersebut juga merupakan salah satu senjata yang ampuh untuk terus mengembangkan potensi budaya lokal di Kota Serang.

Peran pemerintah secara penuh tentunya sangat diperlukan untuk membantu proses pengembangan UMKM kreatif di Kota Serang. Solusi untuk kemajuan UMKM kreatif di Kota Serang juga diperoleh melalui pendapat informan selaku akademisi pengamat UMKM yang menyampaikan bahwa: Solusinya untuk UMKM kreatif sendiri yaitu: yang pertama jelas pemetaan dulu, pemetaan atau identifikasi kita itu punya industri kreatif seperti apa. Setelah itu, kita memilih mana yang benar-bener ciri khas yang pengen dikembangkan, bagaimana mengenalkan produk itu di luar Kota Serang. Setelah sudah terkenal, baru kan kita membentuk suatu sentra industri. Setelah itu memberdayakan SDM nya untuk meningkatkan kualitas produk. Lalu kita memperkenalkan di level nasional. Pernyataan diatas menyebutkan bahwa solusi yang pertama bagi kemajuan UMKM yaitu perlu dilakukan pemetaan industri kreatif dan industri produktif yang ada di Kota Serang.

Pemetaan disini bisa berupa pembagian cluster Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) seperti UMKM Industri Ekonomi Produktif dan UMKM Industri Ekonomi Kreatif. Setelah itu, memilih produk apa yang menjadi ciri khas Kota Serang serta layak untuk dikembangkan dan bagaimana cara mengenalkan produk kreatif tersebut ke luar daerah. Setelah sudah terkenal, baru dilakukan pembentukan sentra industri kreatif dan Industri Produktif kemudian memberdayakan sumber daya manusia agar kualitas produk tetap terjaga. Langkah terakhir yang dilakukan yaitu dengan memperkenalkan produk kreatif dan produktif UMKM lokal ke level nasional. Mengingat peran UMKM yang strategis dalam pertumbuhan ekonomi rakyat, maka pemerintah daerah Kota Serang khususnya Dinas Koperasi dan UMKM Kota Serang selaku SKPD berwenang melakukan pemberdayaan terhadap UMKM Kota Serang sehingga UMKM mampu bertahan dan memperkuat dirinya menjadi usaha yang tangguh, mandiri, dan besar.

1. Peran Dinas Perdagangan Perindustrian dan Koperasi UMKM Pemerintah Kota Serang Dalam Pemberdayaan UMKM di Kota Serang

Dalam pemberdayaan terhadap Usaha Kecil Menengah, Dinas Koperasi dan UMKM Kota Serang melakukan berbagai upaya, antara lain: pertama, pembinaan sumber daya manusia (SDM), pembinaan dilakukan dengan memberikan bimbingan kewirausahaan berupa pelatihan-pelatihan terhadap UMKM seperti pelatihan peningkatan fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Pelatihan tersebut tentang prosedur kepengurusan hak paten, hak merk, legalitas usaha, desain produk, kewirausahaan dan manajemen. Pelatihan merupakan investasi organisasi yang penting dalam sumber daya manusia. Pelatihan melibatkan segenap sumber daya manusia untuk mendapatkan pengetahuan dan keterampilan pembelajaran sehingga mereka akan segera dapat menggunakannya dalam pengembangan usaha mikro mereka. Pada dasarnya, pelatihan diperlukan karena adanya kesenjangan antara keterampilan yang dibutuhkan dengan keterampilan yang dimiliki sekarang.

Hal tersebut sesuai dengan pendapat Mc Celland (1993) dalam Simanjuntak : 1998) yang menyatakan bahwa memberikan bantuan pelatihan dalam bentuk pelatihan kewirausahaan dan bimbingan teknologi (Bintek). Dengan adanya program pembinaan tersebut akan meningkatkan keterampilan teknis produksi, kemampuan managerial, kemampuan inovasi produk dan daya saing akan meningkat, sehingga akan meningkatkan

volume penjualan, mendorong pertumbuhan unit usaha dan peningkatan struktur unit usaha industri. Sedangkan menurut Hamalik (2001 : 10), pelatihan adalah suatu proses yang meliputi serangkaian tindak (upaya) yang dilaksanakan dengan sengaja dalam bentuk pemberian bantuan kepada tenaga kerja yang dilakukan oleh tenaga kerja profesional kepelatihan dalam satuan waktu yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan kerja peserta dalam bidang pekerjaan tertentu guna meningkatkan efektivitas dan produktifitas tenaga kerja.

Pendapat yang sama juga disampaikan oleh Suharto (2009, h.67) yang menyatakan bahwa proses dan pencapaian tujuan pemberdayaan dapat dicapai melalui penguatan dan penyokongan. Pemerintah memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya, menumbuh kembangkan segenap kemampuan dan kepercayaan diri masyarakat yang menunjang kemandirian mereka, serta memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat mampu bertahan agar tidak terjatuh kedalam keadaan dan posisi yang semakin lemah dan terpinggirkan. Dalam hal ini, Dinas Koperasi dan UMKM Kota Serang memberikan penguatan dan penyokongan kepada pelaku UMKM melalui pelatihan-pelatihan dalam rangka meningkatkan sumber daya bagi pelaku industri kecil agar mampu bertahan dan usahanya lebih berkembang.

Kedua, bantuan pengaksesan permodalan. Dinas Koperasi dan UMKM Kota Serang memberikan bantuan informasi bagaimana mendapatkan modal pada pihak ke tiga yaitu perbankan dan memberikan informasi bagaimana menyusun proposal yang baik dalam mengajukan permodalan. Selain itu juga Dinas Koperasi dan UMKM Kota Serang juga memfasilitasi antara UMKM dengan Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi untuk mendapatkan dana hibah maupun bergulir. Bantuan pengaksesan permodalan yang dilakukan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Serang sesuai dengan pendapat Sesuai dengan pendapat Suharto (2009, h.67) bahwa pemberdayaan dapat dicapai melalui pendekatan pemberdayaan salah satunya yaitu pemungkinan dengan menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal.

Berbeda dengan pendapat Wardhana, (2017) yang menyatakan bahwa peran pemerintah daerah dalam pemenuhan kebutuhan modal bagi pelaku UMKM tentu saja tidak hanya terbatas sebagai pihak yang menyediakan informasi belaka. Pemerintah Daerah seyogyanya memberikan dukungan yang lebih nyata akan keterbatasan pelaku UMKM dalam hal modal usaha, termasuk namun tidak terbatas pada kebutuhan jaminan sebagai salah satu syarat utama yang dibutuhkan dalam mendapatkan modal tersebut. Pendekatan tersebut sesuai yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Serang dalam memberikan bantuan pengaksesan permodalan berupa informasi untuk mendapatkan modal dan bagaimana cara menyusun proposal yang baik.

Ketiga, mengembangkan jaringan kerjasama bagi UMKM. Dinas Koperasi dan UMKM Kota Serang bekerjasama dengan pihak swasta maupun Dinas terkait. Kerjasama dengan pihak swasta untuk menangani UMKM yang bermasalah dan memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi UMKM yang berkoordinasi dengan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Serang. Selain itu Dinas Koperasi dan UMKM Kota Serang berkerjasama dengan Dinas terkait seperti dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (DISPERINDAG). DISPERINDAG memberikan bantuan tenaga ahli yang berkompeten untuk menjadi narasumber di berbagai pelatihan yang diadakan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Serang. Selain itu, Dinas Koperasi dan UMKM Kota Serang juga mendukung dan memediasi binaan dari Dinas dengan pihak swasta lain. Kerjasama tersebut bertujuan untuk memfasilitasi kebutuhan promosi bagi pelaku UMKM Kota Serang yang tergabung dalam berbagai kelompok atau koperasi tersebut.

Hal tersebut sesuai dengan pendapat Hafsah (2004, h.43) yang menyatakan hal yang perlu diupayakan dalam pengembangan UMKM salah satunya adalah pengembangan kemitraaan, perlu dikembangkan kemitraan yang saling membantu antara UMKM, atau antara UMKM dengan pengusaha besar di dalam negeri maupun di luar negeri, untuk menghindarkan terjadinya monopoli dalam usaha. Disamping itu juga untuk memperluas pangsa pasar dan pengelolaan bisnis yang lebih efisien. Dengan demikian UMKM akan mempunyai kekuatan dalam bersaing dengan pelaku bisnis lainnya, baik dari dalam maupun luar negeri. Dalam kerjasama tersebut pihak koperasi atau kelompok usaha lainnya dapat membantu UMKM dalam pemasaran produknya.

Keempat, Pengenalan produk-produk UMKM melalui pameran dan promosi. Dalam mengenalkan produk UMKM ke masyarakat luas, Dinas Koperasi dan UMKM Kota Serang melakukan kegiatan pameran dan promosi bagi UMKM. Dengan adanya pameran dan promosi ini UMKM dapat memperluas pemasarannya serta memberikan peluang untuk bekerjasama dengan UMKM lain maupun pengusaha besar. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Hafsah (2004, h.43) pengembangan UMKM yang perlu diperhatikan salah satunya adalah mengembangkan promosi, hal tersebut guna lebih mempercepat proses kemitraan antara UMKM dengan usaha besar diperlukan media khusus dalam upaya mempromosikan produk-produk yang dihasilkan. Dalam hal ini, Dinas Koperasi dan UMKM kota Serang memberdayakan UMKM Kota Serang dalam hal pengenalan produk-produk UMKM melalui pameran dan promosi. Dari adanya pameran dan promosi tersebut selain mambantu dalam memasarkan produk mereka, manfaat yang diperoleh dari beberapa UMKM yang mengikuti pameran dapat mengembangkan kerjasama dengan UMKM di daerah lain selain. Hal ini juga sesuai dengan (UU No. 9 Tahun 1995, pasal 16 yang berbunyi "memberikan bantuan fasilitasi pemasaran hasil produksi yaitu dengan cara promosi serta perluasan jaringan pasar. Melalui bantuan pemasaran tersebut masalah hasil pemasaran produk dapat diatasi dan akhirnya akan meningkatkan jumlah penjualan, berkembangnya usaha dan mendorong perubahan struktur pertumbuhan industri".

Dengan adanya pelatihan serta di dukung dengan fasilitasi pemasaran yang diberikan oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang bekerja sama dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Penanaman Modal Pemerintah Kota Serang diharapkan pengusaha kecil dapat mengembangkan usahanya, sehingga kedepannya mampu menciptakan hasil variasi olahan produksi yang berkualitas baik, sehingga pada akhirnya nanti mampu berkembang hingga mencapai pasaran lokal maupun internasional.

2. Tantangan yang dihadapi oleh Dinas Perdagangan Perindustrian dan Koperasi UMKM Pemerintah Kota Serang dalam Pemberdayaan UMKM di Kota Serang

Tantangan yang dihadapi oleh Dinas Perdagangan Perindustrian dan Koperasi UMKM Pemerintah Kota Serang dari pelaksanaan pemberdayaan terhadap UMKM adalah pertama, keterbatasan sumber daya manusia. selain terbatasnya jumlah sumber daya manusia yang dimiliki juga kurangnya sumber daya manusia yang berkompetensi dalam melakukan kegiatan pemberdayaan UMKM, diantaranya adalah konsultan dan tenaga penyuluh. Peran dari pemerintah selaku pelopor, yaitu pemerintah harus menjadi panutan (*role model*) bagi seluruh masyarakat Siagian (2012, h.142-149).

Disini Dinas Koperasi dan UMKM Kota Serang dengan terbatasnya pegawai yang berkompeten dalam hal UMKM bagaimana bisa menjadi panutan jika kompetensi sumber daya manusia yang dimiliki saja masih kurang. Maka dari itu, Dinas Koperasi dan UMKM Kota Serang dituntut untuk bisa meningkatkan kecakapan dan kompetensi sumber daya manusianya.

Kedua, terbatasnya anggaran yang dimiliki. Banyaknya program kegiatan yang dicanangkan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Serang bagi UMKM dengan pencapaian target 100% diperlukan dana yang tidak sedikit. Dana yang bersumber dari dana APBD Kota Serang maupun Provinsi Banten masih terbatas untuk melakukan pemberdayaan UMKM. Ketiga, kesulitan permodalan UMKM. Sulitnya prosedur yang harus dilalui dan persyaratan yang diajukan oleh lembaga keuangan kepada UMKM dalam meminjam modal adalah masalah yang sering dihadapi oleh UMKM Kota Serang. Bantuan permodalan merupakan strategi dalam pengembangan UMKM yaitu pemerintah perlu memperluas skema kredit khusus dengan syarat-syarat yang tidak memberatkan bagi UMKM, untuk membantu peningkatan permodalannya, baik itu melalui sektor jasa finansial formal, sektor jasa finansial informal, skema penjaminan, leasing dan dana modal ventura Hafsah (2004, h.43). Dalam hal ini, pemerintah yaitu Dinas Koperasi dan UMKM Kota Serang yang selama ini hanya memfasilitasi dengan bantuan pengaksesan permodalan saja, sebaiknya memberikan kredit khusus kepada UMKM dengan persyaratan yang mudah baik melalui sektor jasa finansial formal maupun informal, adanya jaminan maupun dana modal ventura.

Keempat, Permasalahan teknis UMKM. Permasalahan teknis yang dihadapi oleh UMKM adalah seputar proses produksi, teknik pemasaran, promosi produk. Permasalahan teknis tersebut pada umumnya kurang diperhatikan oleh pelaku UMKM sehingga menjadi faktor penghambat bagi Dinas Koperasi dan UMKM Kota Serang dalam melakukan pemberdayaan dan tentunya menghambat kemajuan dalam usaha UMKM. Dengan permasalahan teknis yang dihadapi oleh pelaku UMKM tersebut, maka Dinas Koperasi dan UMKM Kota Serang perlu menerapkan strategi khusus dalam memberdayakan masyarakat yaitu seperti yang diungkapkan oleh Suryono (2010, h.262-263) adalah memaksimalkan peran pemerintah. Dalam hal ini, pemerintah yaitu Dinas Koperasi dan UMKM Kota Serang dituntut untuk lebih memaksimalkan perannya dalam melakukan pemberdayaan UMKM, dengan cara sebelum melakukan pemberdayaan melakukan mengidentifikasi terlebih dahulu terhadap UMKM berdasarkan tingkat keberdayaannya, berdaya dan tidaknya diidentifikasi agar memaksimalkan pemberdayaan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Serang agar dalam prosesnya tidak salah sasaran dan lebih terarah.

3. Inovasi yang dilakukan Dinas Perdagangan Perindustrian Dan Koperasi UMKM Pemerintah Kota Serang dalam melakukan Pemberdayaan UMKM di Kota Serang

Inovasi yang dilakukan Dinas Perdagangan Perindustrian Dan Koperasi UMKM Pemerintah Kota Serang dalam pelaksanaan pemberdayaan UMKM adalah pertama, adanya struktur yang terintegrasi. Dengan adanya kejelasan di dalam struktur organisasi sebagai pelaksana kebijakan telah mendukung keberhasilan pelaksanaan pemberdayaan UMKM Kota Serang. Hal tersebut sesuai yang dikemukakan oleh Tambunan (2002, h.146) yang menyatakan peranan pemerintah daerah pada tingkat provinsi maupun distrik salah satunya adalah implementasi, elaborasi, dan koordinasi dari kebijaksanaan KUMKM pemerintah pusat. Dalam hal ini Dinas Koperasi dan UMKM Kota Serang merupakan badan pemerintah daerah yang memiliki struktur organisasi yang terintegrasi sehingga mempermudah dalam mengimplementasikan, elaborasi dan menjalin kerjasama dalam melaksanakan kebijaksanaan dari pemerintah pusat terkait dengan UMKM.

Kedua, adanya Koperasi yang menaungi UMKM. Kelompok-kelompok usaha yang telah ada perlu diperkuat, untuk meningkatkan perannya antara lain dalam pengembangan jaringan informasi usaha yang sangat dibutuhkan untuk pengembangan usaha bagi anggotanya Hafsah (2004, h.43). Dalam hal ini, pembentukan koperasi dan kelompok usaha adalah sebagai wadah yang menaungi pelaku UMKM Kota Serang, dan guna menguatkan peranannya. Hal tersebut dilakukan UMKM agar menjadi bagian resmi dari Dinas Koperasi

dan UMKM Kota Serang sehingga memudahkan dalam melakukan pemberdayaan terhadap UMKM.

Ketiga, pemanfaatan teknologi ebusiness. Adanya teknologi e-business dimanfaatkan untuk mengolah data informasi terkait UMKM yang ada di Kota Serang. Selain itu, teknologi e-business seperti website juga dimanfaatkan oleh pelaku UMKM untuk mengembangkan usahanya dalam memasarkan produk mereka. Pemanfaatan e-business tersebut sesuai dengan pendapat Kartasmita yang dikutip oleh Nasirin dan Alamsyah (2010, h.89) strategi pemberdayaan dengan menciptakan suasana iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang, setiap masyarakat memiliki potensi untuk dikembangkan. Dalam hal ini, pemanfaatan teknologi e-business merupakan upaya dari Dinas Koperasi dan UMKM kota Serang dalam mengembangkan potensi dari UMKM. Dalam e-business, UMKM dapat mempromosikan produk-produknya, dan tentu saja hal itu peluang bagi UMKM agar produk-produknya lebih dikenal oleh masyarakat luas yang tentu saja akan berdampak pada meningkatnya omset penjualan.

Keempat, dukungan pihak-pihak terkait. Dinas Koperasi dan UMKM Kota Serang memiliki pegawai yang sebagian kurang berkompeten dalam bidang UMKM sehingga perlu mengembangkan jaringan kerjasama dengan Dinas terkait seperti Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Dinas Perindustrian dan Perdagangan memberikan bantuan narasumber pada pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Serang. Misalnya pelatihan Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Hal tersebut sesuai dengan pendapat Tambunan (2002, h.146) yang menyatakan peranan pemerintah daerah tingkat provinsi maupun distrik salah satunya yaitu koordinasi dan integrasi perencanaan, program, dan aktivitas-aktivitas pengembangan UMKM. Dalam hal ini Dinas Koperasi dan UMKM dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta Dinas Koperasi berkoordinasi dan berintegrasi dalam memberikan pelatihan terhadap UMKM guna menumbuh kembangkan usaha dari UMKM tersebut

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Fatih, Andy. (2010). Implementasi Kebijakan dan pemberdayaan Masyarakat. Bandung: Unpad Press
- Arikunto, Suharsimi. 2013. Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka Cipta
- Badan Pusat Statistik Kota Serang <http://serangkota.bps.go.id>
- Danial, Endang. (2007). Economy Civic. Bandung: Laboratorium PKN UPI
- Dinas Perdagangan Perindustrian dan Koperasi UMKM Pemerintah Kota Serang <https://ppid.serangkota.go.id/pages/disperindagkop>
- Guntur, Effendi. (2009). Pemberdayaan Ekonomi Rakyat, Transformasi Perekonomian Rakyat Menuju Kemandirian dan Berkeadilan. Jakarta: PT Agung Seto
- Hendrayanti, Pemi. (2017). Peran Koperasi Siswa dalam Membina Economic Civics Siswa di SMP Negeri 1 Cikalong. (Skripsi) Departemen Pendidikan Kewarganegaraan Fakultas Pendidikan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Indonesia
- Heryani, Ani. (2010). Paradigma Kebijakan Publik. Bandung: Unpad Press
- Hikmawati, Fenti. (2017). Metodologi Penelitian. Depok: Raja Grafindo Persada <https://kenali.co/berita-1487-inilah-pengertian-umkm-secara-umum-dan-para-ahli.html>
- Idris, Amiruddin. (2018). Ekonomi Publik. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Jamaluddin, Ahmad. (2002). Ekonomi Publik II. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Kurniawati, dkk. (2013). Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Usaha Ekonomi. Jurnal Administrasi Publik, Vol.1 (4):9-14.

- Muliawathi., (2017). Tantangan “role” atau Peran Yang Dihadapi Oleh Mantan Perawat IJ-EPA Setelah Kembali Ke Indonesia. *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humamiora*. Vol.4 No.2 Hal.107
- Munandar, Aris., (2008). Peran Negara Dalam Penguatan Program Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Politik*, 4(1):151-162.
- Narbuko Cholid, dkk. (2010). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara
- Noor, M., (2011). Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Ilmiah Civics*, Vol.1(2):88.
- Nurmalina Komala, dkk. (2008). Materi pokok Pendidikan Kewarganegaraan. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia
- Pradana Putra Arysta Candra, dkk., (2012). Peran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dalam Pemberdayaan Pengrajin Perak Sebagai Produk Unggulan Daerah (Studi pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 2(1):95-101.
- Putra Adnan Husada., (2016). Peran UMKM dalam Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Blora. *Jurnal Analisa Sosiologi*, 5(2):44.
- Saepudin, Leli. (2014). Penguatan Nilai Kesukarelaan dalam Membangun Ekonomi Kewarganegaraan Bagi Masyarakat Demokratis Melalui Situs Kewarganegaraan (Studi Kasus pada Komunitas Bandung Creative City Forum). (Tesis) Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung
- Sakur., (2011). Kajian Faktor-Faktor yang Mendukung Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah: Studi Kasus di Kota Surakarta. *Spirit Publik*, 7(2):92-94.
- Sarwono Wirawan Sarlito. (2008). *Teori-Teori Psikologi Sosial*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono. (2002). *Teori Peranan*. Jakarta: Bumi Aksara
- Somantri, Numan. (1976). *Metode Mengajar Civics*. Jakarta: Erlangga
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sukandarrumidi. (2018). *Metodologi Penelitian: Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- SUMKMadinata Nana Syaodih. (2016). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Sumodiningrat, Gunawan. (2009). *Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta. PT Gramedia Pustaka Utama
- Tanjung M Azrul. (2016). *Koperasi dan UMKM sebagai Fondasi Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Erlangga
- Tri Danuar Dani, dkk., (2013). Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Berbasis Ekonomi Kreatif di Kota Semarang Diponegoro *Jurnal of Economics*, 2(4):86-92
- Ubaedillah, A. (2015). Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education) Pancasila, Demokrasi, dan Pencegahan Korupsi. Jakarta: Prenadamedia Group
- Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 Ayat 2 Tentang Hak dan Kewajiban Warga Indonesia
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang UMKM
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil
- Wahab A, dkk. (2011). *Teori dan Landasan Pendidikan Kewarganegaraan*. Bandung: Alfabeta
- Winarno. (2013). *Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta: Bumi Aksara
- Wulandari, Sri., (2013). Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam pelaksanaan MUSRENBANG di Kota Tarakan. *Ejurnal Administrasi Negara*. Vol.1 No. 4 Hal. 1544.
- Wuryan S, dkk. (2013). *Ilmu kewarganegaraan (Civics)*. Bandung: Laboratorium Pendidikan Kewarganegaraan UPI